

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Salam, Faisal. (2003). *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Taufik, Muhammad. (2013). *"Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan."* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Vol. hal.86-87. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsan. (1981). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Rawls, John. (1997). *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press: Cambridge.
- Farida Indrawati, Maria. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Arrasjid, Chainur. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firas Saukat, Faizal. (2012). *"Konsep Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berbasis Demokrasi Deliberatif Dan Hukum Responsif."* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

JURNAL/SKRIPSI

- Gunawan, I Ketut. (2013). *"Military Withdrawal from Politics: Discourse and Reform Agenda,"* n.d. [https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/withdrawal%20\(03-14-13-01-55-57\).pdf](https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/withdrawal%20(03-14-13-01-55-57).pdf).
- Aziz, Noor Muhammad. (2012). *"Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,"* April 1. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%20%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf>.
- Amal, Ichlasul. (2021). *"Political Parties And The Origin Of Regional Autonomy In Indonesia,"* n.d. <https://igpa.map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/274/2021/08/Bulletin-Insight-Edisi-2-2-IGPA-MAP-Fisipol-UGM-Agustus-2021.pdf>.
- Herawati, Ratna. (2022). *"Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia,"*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5084/2649>.
- Hermanto, Bagus. (2022). *"Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan,"*. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/6/pdf>.
- Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi,* 2021. https://bphn.go.id/data/documents/2021_ae_uu_11_2019_sisnas_iptek.pdf.
- Sherlock, Stephen. (2019). *"Parliamentary Indicators Indonesia,"* n.d. <http://www.parliament.am/library/kanonakarger/indonezia.pdf>
- Mcleod, Ross H. (2007). *"The struggle to regain effective government under democracy in Indonesia,"*. <https://doi.org/10.1080/00074910500117289>.

Muqowim. (2001). *Keadilan di Mata John Rawls*. Januari. Vol. volume. 2. Nomor 1. Jurnal Esensia.

ARTIKEL

- Al Hikam, Herdi Alif. (2022). “*Sri Mulyani Ingin Reformasi Pensiun, Muncul Desakan Hapus Jatah DPR!*,”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6270018/sri-mulyani-ingin-reformasi-pensiun-muncul-desakan-hapus-jatah-dpr>.
- Anggota DPRD Sidoarjo Permasalahankan Dana Pensiun untuk Anggota DPR.* Mei 2013. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8421>.
- Anggota DPRD Tak Berhak Atas Uang Pensiun.* September 5, 2013. <https://www.hukumonline.com/berita/a/anggota-dprd-tak-berhak-atas-uang-pensiun-lt52288d1f39e5f/>
- Bayu, Galih. (2019). “*Kontroversi Dana Pensiun Seumur Hidup bagi Anggota DPR,*,”. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/11/19090731/kontroversi-dana-pensiun-seumur-hidup-bagi-anggota-dpr?page=all>.
- Damayanti, Aulia. (2021). “*Terima Seumur Hidup, Uang Pensiun Anggota DPR Bisa Diwariskan ke Istri/Suami,*,”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5724873/terima-seumur-hidup-uang-pensiun-anggota-dpr-bisa-diwariskan-ke-istri-suami>.
- “*Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019–2024,*” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2019%E2%80%932024.
- “*Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017,*” July 2, 2018. <https://jabar.bpk.go.id/hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dprd-berdasarkan-pp-nomor-18-tahun-2017/>.
- Hasibuan, Lynda. (2022). “*Gaji Pensiunan PNS vs Anggota DPR, Mana yang Lebih Membebani?*,”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220903084112-4-368993/gaji-pensiunan-pns-vs-anggota-dpr-mana-yang-lebih-membebani>.
- Nur Azharah, Putri. (2024). “*Jika Istri Pensiunan PNS Meninggal Dunia, Dapat Apa dari Taspen? Ini Daftar Hak yang Diterima,*,”. <https://www.ayobandung.com/umum/7911773765/jika-istri-pensiunan-pns-meninggal-dunia-dapat-apa-dari-taspen-ini-daftar-hak-yang-diterima>.
- Nurhadi, M. (2022). “*Enaknya Jadi Anggota DPR, Sudah Meninggal Pasangan Tetap Dapat Uang Pensiun,*,”. <https://www.suara.com/bisnis/2022/08/29/163110/enaknya-jadi-anggota-dpr-sudah-meninggal-pasangan-tetap-dapat-uang-pensiun>.
- Prasiska Sadidah, Ratu. (2023). “*Gaji Pensiunan Dianggap Bebani APBN Hotman Paris: Hapus Saja Dana Pensiun DPR, Kerjanya Cuma 5 Tahun,*,”. <https://www.ayobandung.com/umum/7910248608/gaji-pensiunan-dianggap-bebani-apbn-hotman-paris-hapus-saja-dana-pensiun-dpr-kerjanya-cuma-5-tahun>.

- Putranto Saphutomo, Arya. (2022). “*Wacana Penghapusan Uang Pensiun DPR Butuh Tekanan Publik yang Kuat*,”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/17414481/wacana-penghapusan-uang-pensiun-dpr-butuh-tekanan-publik-yang-kuat?page=all>.
- “*Seorang Driver Ojol Gugat Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR ke MK*.” September 8, 2022. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6280043/seorang-driver-ojol-gugat-uang-pensiun-seumur-hidup-anggota-dpr-ke-mk>.
- Liza, Safira. (2024). “*Sesuai Hukum: BKN Jelaskan Batas Usia Pensiun PNS Jabatan Fungsional Menurut UU ASN No 20 Tahun 2023 Hanya Sampai Umur*,”. <https://www.klikpendidikan.id/news/35811600419/sesuai-hukum-bkn-jelaskan-batas-usia-pensiun-pns-jabatan-fungsional-menurut-uu-asn-no-20-tahun-2023-hanya-sampai-umur>.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administratif Anggota DPR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan